

**PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA
OLEH PARTAI POLITIK DI KOTA PADANG PANJANG
(Studi pada Partai Golkar dan PAN)**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh:
ROBBY KURNIAWAN
2006/73651

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pendidikan Politik bagi Generasi Muda oleh Partai Politik
di Kota Padang Panjang (Studi pada Partai Golkar dan
PAN)

Nama : ROBBY KURNIAWAN

TM/NIM : 2006/73651

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

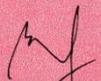
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 Agustus 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
NIP. 195810171985031001

Pembimbing II



Dra. Al Rafni, M.Si
NIP. 196802121993032001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

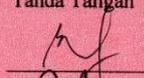
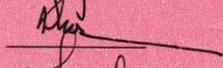
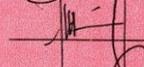
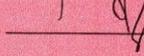
Pada hari Kamis, Tanggal 21 Agustus 2014 Pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

**Pendidikan Politik bagi Generasi Muda oleh Partai Politik
di Kota Padang Panjang
(Studi pada Partai Golkar dan PAN)**

Nama : ROBBY KURNIAWAN
TM/NIM : 2006 / 73651
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 21 Agustus 2014

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	
Sekretaris : Dra. Al Rafni, M.Si	
Anggota : Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd	
Anggota : Dr. Fatmariza, M.Hum	
Anggota : Drs. Suryanef, M.Si	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP.196210011989031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ROBBY KURNIAWAN**

TM/NIM : 2006/73651

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Panjang, 21 Mei 1987

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul: Pendidikan Politik bagi Generasi Muda oleh Partai Politik di Kota Padang Panjang (Studi pada Partai Golkar dan PAN) adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Agustus 2014

Saya yang menyatakan,



ROBBY KURNIAWAN
2006/73651

ABSTRAK

Robby Kurniawan, TM/NIM : 2006/73651, Pendidikan Politik bagi Generasi Muda oleh Partai Politik di Kota Padang Panjang (Studi pada Partai Golkar dan PAN)

Kurang optimalnya fungsi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi generasi muda merupakan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran politik dan tingkat partisipasi generasi muda, itu terjadi karena parpol belum serius melaksanakan pendidikan politik dan hanya berfokus pada kepentingan dan tujuan partai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui program pendidikan politik oleh parpol, materi yang digunakan oleh parpol, serta apa saja metoda dan media yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan politik terhadap generasi muda.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa alat perekam, pedoman wawancara, dan foto. Uji keabsahan data adalah dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif yang dilakukan melalui prosedur pengumpulan data, seleksi dan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa program pendidikan politik yang dirancang oleh Partai Golkar dan PAN dalam melaksanakan pendidikan politik kepada generasi muda dapat dikatakan belum optimal. Program yang dirancang dalam Rakerda oleh partai Golkar yang dilaksanakan hanya berupa kegiatan yang berhubungan dengan sukses kaderisasi. Sedangkan program yang telah dilaksanakan hanya berkaitan dengan usaha pendekatan langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi atau pertemuan tatap muka. Begitu juga dengan PAN, program yang dirancang dalam Rakerda tidak dilaksanakan. PAN hanya melaksanakan kegiatan berupa pertemuan tatap muka seperti sosialisasi dan temu ramah pada saat kampanye. Materi yang diberikan oleh kedua partai yaitu Partai Golkar tentang kondisi sosial masyarakat, visi dan misi partai. Materi tentang nasionalisme dan pancasila hanya diberikan kepada kader partai dan telah disesuaikan dengan Garis Besar Pengkaderan. Sedangkan PAN memberikan materi yang berkaitan dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara, serta visi dan misi dari partai PAN. Namun semua materi tersebut disesuaikan dengan tema program kegiatan yang akan dilaksanakan. Metoda yang digunakan oleh Partai Golkar dan PAN yaitu menggunakan metoda pertemuan tatap muka dengan bersosialisasi terhadap masyarakat, diskusi, ceramah dan simulasi ketika kampanye politik menjelang pemilu. Media yang digunakan oleh Partai Golkar dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik menggunakan media cetak lokal dan elektronik seperti surat kabar dan radio lokal, spanduk, dan baliho. Semua program yang dilaksanakan melalui media tersebut bertujuan untuk menarik simpati dan dukungan dari semua kalangan masyarakat, bukan untuk memberikan pendidikan politik dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan politik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendidikan Politik bagi Generasi Muda oleh Partai Politik di Kota Padang Panjang (Studi pada Partai Golkar dan PAN)”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Pembimbing I, yang penuh dengan kesabaran dalam membimbing, akhirnya penulis dapat juga menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dalam mendengar keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. H. Helmi Hasan, M.Pd, Bapak Drs. Suryanef, M.Si, dan beserta Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syakwan Lubis selaku Penasehat Akademis, yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan.
7. Bapak Drs. Asril Kasuma selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Padang Panjang beserta Pengurus DPD Partai Golkar lainnya.
8. Bapak H. Eko Furqani, SE, MM selaku Ketua DPD PAN Kota Padang Panjang beserta Pengurus DPD PAN lainnya.
9. Yang terkasih kedua orang tuaku yang menjadi motivasi dalam hidupku serta selalu memberikan semangat dan dorongan dalam hidupku dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua rekan-rekan yang selalu memberikan motivasi dan dukungan.
11. Generasi Muda Padang Panjang yang telah membantu penelitian ini dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan selama penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Idenifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah	15
E. Fokus Penelitian	15
F. Tujuan Penelitian	16
G. Manfaat Penelitian	16
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori	18
1. Pengertian dan Hakekat Pendidikan Politik.....	18
2. Landasan Hukum Pendidikan Politik.....	22
3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik	23
4. Materi Pendidikan Politik	29
5. Metoda dan Media Pendidikan Politik.....	32
6. Pelaksanaan Pendidikan Politik	39
B. Kerangka Konseptual	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Metoda Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	49
C. Informan Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	50
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	52

F. Uji Keabsahan Data.....	54
G. Teknik Analisa Data.....	55

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	59
B. Temuan Khusus.....	67
1. Partai Golongan Karya.....	67
2. Partai Amanat Nasional (PAN).....	83
C. Pembahasan.....	96

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hasil penghitungan suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang periode 2008-2013	6
Tabel 1.2	Hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang Panjang pada Pemilu Legislatif tahun 2009-2014	7
Tabel 1.3	Daftar penggunaan surat suara di Kota Padang Panjang pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang Panjang tahun 2009-2014	7
Tabel 3.1	Nama Informan Penelitian dari Pengurus Partai Politik.....	50
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelurahan Tahun 2012.....	62
Tabel 4.2.	Program Partai Golkar Kota Padang Panjang dalam Rakerda Tahun 2012	68
Tabel 4.3.	Program Tahunan Partai Golkar yang Telah Dilaksanakan Menurut Pengurus DPD Golkar Kota Padang Panjang	74
Tabel 4.4.	Program DPD PAN Kota Padang Panjang dalam Rakerda Tahun 2012	84
Tabel 4.5.	Program yang Telah dilaksanakan PAN Menurut Pengurus DPD PAN Kota Padang Panjang	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Fakultas
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang
- Lampiran 5 Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian dari Partai Golkar
- Lampiran 6 Surat Keterangan telah selesai melakukan penelitian dari PAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah Negara demokrasi partai politik merupakan alat yang baik untuk menghubungkan rakyat dengan pemerintah terutama dalam proses kegiatan politik. Sebagai penghubung rakyat dengan pemerintah, partai politik menyalurkan keinginan rakyat yang sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi kesimpangsiuran pendapat di dalam suatu masyarakat dan dapat dijadikan barometer demokratis atau tidaknya sistem politik di dalam sebuah negara.

Partai politik di dalam era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka (Budiardjo, 1992:160).

Menurut UU. No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU. No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa :

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Partai politik memiliki beberapa fungsi, yang mana salah satunya adalah memberikan pendidikan politik sebagai sarana sosialisasi politik. Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang

perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, “Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik, lembaga kekuasaan, dan pemerintahan kepada masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga tercipta kesadaran politik.

Pendidikan politik bisa diperoleh melalui beberapa jalur seperti yang dijelaskan dalam Intruksi Presiden nomor 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda bahwa jalur-jalur terlaksananya pendidikan politik melalui : a) jalur formal, b) jalur informal, dan c) jalur non formal. Jalur formal pendidikan politik didapat melalui pendidikan di lembaga formal seperti di sekolah. Sementara melalui jalur informal dan non formal dapat dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

Pendidikan politik bertujuan untuk mengupayakan masyarakat memiliki penghayatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup bermasyarakat termasuk hidup bernegara serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Artinya, pendidikan politik menginginkan agar masyarakat berkembang menjadi warga negara yang baik dan menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya serta sadar akan hak dan kewajibannya didalam kerangka nilai-nilai tersebut. Pendidikan politik dapat

dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok organisasi yang tidak terhitung jumlahnya.

Adapun peran yang dijalankan oleh partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memasukkan ketentuan tentang pendidikan politik, hal ini dinyatakan dalam pasal 34 ayat 3a dan 3b. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa partai akan menerima bantuan dari APBN yang penggunaannya diprioritaskan untuk pendidikan politik. Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan mengenai pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu : Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Kesatuan Negara Republik Indonesia, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan kaderisasi berjenjang keanggotaan partai politik.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM disebutkan bahwa 60% bantuan keuangan partai politik wajib digunakan untuk pendidikan politik. Bantuan tersebut lebih jelasnya dapat dilihat seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dalam pasal 9 dan pasal 10 yaitu :

1. Pasal 9.

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

2. Pasal 10.

a. Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berkaitan dengan:

- 1) Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 3) Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Berkenaan dengan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada aggotanya dan masyarakat, partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan tanpa adanya proses evaluasi. Harusnya partai politik yang oleh Antonio Gramsci dikategorikan sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil (Roger Simon, 1999:28), diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai *Instrument Of Political Education* dengan baik dan benar.

Partai politik sebagai salah satu lembaga yang memberikan pendidikan politik sangat minim dalam melakukan pendidikan politik dan juga dalam upaya membentuk kader partai yang berkualitas. Pendidikan politik juga kurang dikalangan masyarakat sipil. Hal ini terjadi karena masyarakat sendiri menganggap politik sebagai sesuatu yang kotor, penuh kompetisi dan persaingan yang tidak baik di dalam mencari massa dan mencapai kekuasaan. Pemahaman ini menyebabkan sebagian masyarakat kita menjadi apatis dan acuh tak acuh, apalagi dikalangan generasi muda yang menganggap bahwa politik bukanlah konteks wawasan yang perlu diketahui dan diikuti secara mendalam.

Dari lima fungsi partai politik yang ada, terlihat partai politik hanya memainkan peran tak jauh dari urusan pemilu atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Sedangkan peranannya untuk melakukan pendidikan politik, rekrutmen politik, dan sosialisasi politik dalam konteks pengkaderan anak bangsa jelas terlihat masih sangat terbatas (Agun, 2011). Sehingga partisipasi aktif generasi muda dalam demokrasi Indonesia pada kenyataannya tidak terwujud karena pendidikan politik sebagian generasi muda terbatas hanya terdapat pada jenjang pendidikan formal.

Program partai politik, media dan metoda di dalam pendidikan politik pun masih belum optimal dan memenuhi harapan. Fenomena ini dapat dilihat melalui belum tersosialisasinya generasi muda dalam kehidupan politik, besarnya angka golput (golongan putih), surat suara yang tidak sah, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik dan massa

pendukungnya, penyampaian aspirasi politik yang masih anarkhis, hingga perbuatan pidana yang dilakukan oleh pejabat negara yang berasal dari kader partai politik.

Minimnya pelaksanaan pendidikan politik di Kota Padang Panjang ditandai dengan rendahnya partisipasi politik, kesadaran politik dan pengetahuan politik masyarakat, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Hal itu dapat dilihat dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota periode 2008-2013 serta Pemilu Legislatif periode 2009-2014. Pada saat itu masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya masih tergolong besar, surat suara yang tidak sah dan surat suara yang tidak digunakan juga lumayan besar yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1 Hasil penghitungan suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang periode 2008-2013

No	Uraian	Jumlah	Ket	Persentase
1.	Pemilih terdaftar	30.367	100	100
2.	Menggunakan hak pilih	20.603	67,85	100
3.	Tidak menggunakan hak pilih	9.764	32,15	
4.	Suara sah	20.257	66,71	100
5.	Suara tidak sah	346	1,14	
6.	Tidak memilih dibawah 40 tahun	6.638	67,9	100
7	Tidak memilih diatas 40 tahun	3.126	32,1	

Sumber : KPU Kota Padang Panjang

Berdasarkan tabel diatas, pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota di Kota Padang Panjang yang tidak menggunakan hak pilihnya yaitu 32,15%. Dari 30.367 pemilih yang terdaftar, hanya 20.603 pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, masih ada sekitar 9.764 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dan 346 hak suara yang tidak sah atau rusak. Begitu juga dengan tingkat

partisipasi politik pemilih yang terjadi pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang Panjang pada pemilu legislatif tahun 2009, yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2 Hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang Panjang pada Pemilu Legislatif tahun 2009-2014

No	Uraian	Jumlah	Ket	Persentase
1.	Pemilih terdaftar	32.013	100	100
2.	Menggunakan hak pilih	23.207	72,49	100
3.	Tidak menggunakan hak pilih	8.806	27,51	
4.	Suara sah	22.216	69,4	100
5.	Suara tidak sah	991	3,1	
6.	Tidak memilih dibawah 40 tahun	6.516	73,9	100
7	Tidak memilih diatas 40 tahun	2.290	26,1	

Sumber : KPU Kota Padang Panjang

Tabel 1.3 Daftar penggunaan surat suara di Kota Padang Panjang pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang Panjang tahun 2009-2014

No	Uraian	DPRD KOTA		
		PPB	PPT	Jumlah
1.	Jumlah Surat Suara yang Diterima	19.238	13.419	32.657
2.	Jumlah Surat Suara Sah	13.044	9.172	22.216
3.	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	566	425	991
4.	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai	5.246	3.560	8.806
5.	Jumlah Surat Suara Cadangan	382	262	644

Keterangan : PPB (Padang Panjang Barat)
PPT (Padang Panjang Timur)

Sumber : KPU Kota Padang Panjang

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa di Kota Padang Panjang angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya masih tergolong cukup besar yakni 27,51% atau 8.806 pemilih dari total 32.013 pemilih yang terdaftar. Sedangkan hak suara yang tidak sah yaitu 991 surat suara. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan politik generasi muda yang berusia dibawah 40 tahun.

Berdasarkan observasi penulis di KPU Kota Padang Panjang, dapat diketahui rendahnya minat partisipasi generasi muda untuk ikut berpartisipasi didalam pemilu dan pemilukada, terutama pemilih pemula dan pemilih terdaftar yang tidak berada di daerah pemilihan. Pada Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota periode 2008-2013, dari 9.764 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, terdapat 6.638 pemilih dari generasi muda yang berusia dibawah 40 tahun. Sedangkan pada Pemilu Legislatif DPRD Kota Padang Panjang periode 2009-2014, dari 8.806 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, terdapat 6.516 pemilih dari generasi muda yang berusia dibawah 40 tahun. Dari sekitar 190 juta pemilih di seluruh indonesia, 50 juta pemilih adalah pemilih pemula dengan usia 17-30 tahun. Dalam pemilu legislatif 2009 di Padang Panjang terdapat 84 (21 %) orang yang menggunakan hak pilihnya dari total 396 pemilih pemula yang berusia 17. Dari data diatas dapat diketahui bahwa kurangnya kesadaran generasi muda akan hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya sebagai seorang warga negara dalam berpartisipasi di dunia politik. Dapat disimpulkan bahwa ketidakpahaman tersebut dapat melahirkan generasi muda yang apatis dan pragmatis, padahal generasi muda merupakan generasi penerus bangsa.

Efektifitas dan efesiensi pendidikan politik perlu terus ditingkatkan, karena itu, pemerintah, para pemegang peran dan agen-agen politik terutama partai politik perlu memperhatikan karakteristik pendidikan politik, dan karakteristik pembelajaran generasi muda serta media penunjang pembelajarannya. Meskipun selama ini, pendidikan politik sudah

dilaksanakan, namun partisipasi dan kesadaran politik generasi muda masih relatif rendah. Apalagi dalam proses rekrutmen politik, partai politik lebih cenderung mengutamakan tokoh masyarakat dari pada generasi muda karena menganggap bahwa generasi muda kurang memiliki pengetahuan politik.

Program-program pendidikan politik bagi generasi muda yang dilakukan oleh partai politik kurang variatif dan hanya dilakukan ketika menjelang pemilu atau pemilu. Pada umumnya partai politik hanya melakukan pendekatan kepada generasi muda pada saat kampanye dengan bersosialisasi yang bertujuan untuk mencari massa dan kepentingan partai. Media yang digunakan pun hanya berupa iklan di koran, baliho, spanduk dan stiker pada momen itu saja untuk menyampaikan kegiatan partai, sehingga tidak digunakan untuk melakukan pendidikan politik bagi generasi muda.

Pendidikan politik yang diberikan partai politik tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, partai politik cenderung mensosialisasikan visi dan misi partai saja, tanpa memberikan materi pendidikan politik yang sesuai dengan anjuran undang-undang. Pada umumnya hanya berupa temu ramah, ceramah, dan diskusi, bukan untuk menambah wawasan tentang bagaimana berpolitik yang baik dan benar melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan partai.

Semua permasalahan di atas tidak terlepas dari pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik dan sosialisasi dari pemerintah yang masih kurang maksimal sehingga kesadaran masyarakat khususnya generasi muda masih

kurang aktif dalam memahami kondisi sosial politik yang ada dan lemahnya partisipasi dalam proses demokrasi untuk membangun bangsa ini.

Sadar akan hal tersebut, pemerintah mencoba untuk membangun tameng yang dapat melindungi generasi muda saat ini dari pelunturan dan penghilangan jati diri bangsa. Kekhawatiran pemerintah ini tercermin dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang di dalamnya menyebutkan bahwa:

Kaum muda dalam perkembangannya berada dalam proses pembangunan dan modernisasi dengan segala akibat sampingannya yang bisa mempengaruhi proses pendewasaannya sehingga apabila tidak memperoleh arah yang jelas maka corak dan warna masa depan negara dan bangsa akan menjadi lain daripada yang dicita-citakan.

Perkembangan zaman yang terasa sangat cepat jika tidak dibarengi dengan wawasan berpikir yang luas hanya akan membawa generasi muda bangsa ini ke dalam kehidupan yang lepas kendali. Oleh karena itu, pendidikan politik diperlukan sebagai filter terhadap segala pengaruh buruk yang mungkin datang.

Jadi, pada kesimpulannya pendidikan politik merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam memberikan arah pada generasi muda saat ini agar memiliki pemahaman yang jelas terhadap arah tujuan bangsa.

Di Indonesia ada beberapa partai politik yang memiliki pendukung yang cukup besar dan loyal pada setiap agenda politik yang diselenggarakan.

Dalam hal ini seperti Partai Golongan Karya (GOLKAR) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kedua partai tersebut mempunyai ideologi dan konstituen tersendiri serta memiliki visi dan misi yang berbeda antara satu sama lain yang pada intinya memiliki tugas sebagai organisasi pelaksana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, terutama generasi muda. Pendidikan politik merupakan suatu usaha pengenalan organisasi politik, lembaga kekuasaan, dan pemerintahan kepada anggota dan masyarakat, sehingga tercipta kesadaran politik yang berujung nantinya kepada partisipasi politik dalam pemilu.

Partai Golkar merupakan partai yang sudah lama berdiri, pada masa orde baru partai Golkar bukanlah sebuah partai politik tetapi di anggap sebagai suatu organisasi massa. Partai Golkar bermula berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan presiden Soekarno, tepatnya 1946 oleh Angkatan Darat untuk melindungi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta pemilu.

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah sebuah partai politik yang berhaluan Islam di Indonesia. Asas partai ini adalah “Akhlak Politik Berlandaskan Agama yang Membawa Rahmat Bagi Sekalian Alam”. PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. 20.UM.06.08 tgl. 27 Agustus 2003. Sejarah kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan kelompok tebet.

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material dan spritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. Selebihnya PAN menganut prinsip nonsektarian dan nondiskriminatif. Untuk terwujudnya *indonesia baru*, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara konfederasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik setral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehinggarakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa.

Didalam melakukan sosialisasi politik dan rekrutmen politik, kedua partai tersebut memiliki program dan metoda yang berbeda pula. Seperti Partai Golkar yang telah melakukan program bimbingan dan bantuan sosial serta pendidikan politik bagi rakyat sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bangsa. Sedangkan program yang telah dilakukan PAN contohnya adalah melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan generasi muda, serta pengembangan usaha kecil dan menengah.

Lebih lanjut di Kota Padang Panjang telah dilakukan kegiatan seperti pemberian training atau pelatihan kepada para kader Partai Golkar pada khususnya dan kemudian baru meluas kepada masyarakat pada umumnya tentang kehidupan politik berbangsa dan bernegara serta menanamkan nilai-nilai pancasila yang waktu pelaksanaannya tidak ditentukan secara pasti. Pada bulan Mei yang lalu kami telah melakukan pendidikan politik dengan kegiatan seperti kampanye dengan partai koalisi dalam pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota di Lapangan Khatib Sulaiman Padang Panjang, dan dua bulan sebelumnya kami juga telah mengadakan temu ramah dengan persatuan pedagang pasar kota padang panjang. (wawancara pada observasi tanggal 23 Juli 2013 dengan Marzuki Yunizar, Amd sekretaris DPD Partai Golkar Padang Panjang)

Hal senada juga disampaikan oleh H. Eko Furqani, SE., MM ketua DPD PAN Padang Panjang, PAN telah melakukan kegiatan yang merupakan pendidikan politik seperti mengadakan pertemuan pada bulan April 2013 dengan niniak mamak ampek jurai dan menghimpun aspirasi generasi muda Relawan Anak Nagari Gunung di Balai Adat Kenagarian Gunung, Kota Padang Panjang. (wawancara pada observasi tanggal 25 Juli 2013)

Upaya – upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran politik generasi muda untuk berpartisipasi politik. Dalam hal ini Partai Golkar dan PAN sebagai partai yang cukup besar di Indonesia dituntut untuk memberikan pendidikan politik secara menyeluruh kepada anggota partai dan masyarakat terutama generasi muda. Di Kota Padang Panjang kedua partai ini memiliki pengikut yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat dengan keantusiasan saat kampanye pemilu legislatif 2009 berlansung dan pada hasil pemilu 2009. Berdasarkan informasi dari KPU Kota Padang Panjang, kedua partai tersebut berhasil memperoleh suara yang cukup banyak terutama untuk suara keanggotaan legislatif di Kota Padang Panjang, masing-masing memperoleh 4 kursi dari jumlah total 20 kursi yang diperebutkan. Partai Golkar dengan 4.281 suara dan Partai Amanat Nasional dengan 3.858 suara, sehingga penulis

tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “**Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda oleh Partai Politik di Kota Padang Panjang (Studi Pada Partai Golkar dan PAN)**” mengingat generasi muda merupakan bagian penting dari keberlangsungan demokrasi di Indonesia dan perubahan yang lebih baik oleh bangsa dan negara.

B. Idenifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran politik dan pengetahuan generasi muda tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara karena masih banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi di dalam dunia politik.
2. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kurang optimal karena program pendidikan politik yang diberikan kurang variatif dan ditujukan pada hal-hal praktis atau sesaat seperti pada saat kampanye.
3. Program pendidikan politik yang dilakukan partai politik selama ini hanya bertujuan untuk mencari massa dan kepentingan partai.
4. Materi yang disampaikan partai politik dalam melakukan pendidikan politik pada umumnya hanya terkait penyampaian visi dan misi partai saja.
5. Partai politik tidak memiliki inovasi dan kurang kreatif dalam memilih metoda dan media untuk melakukan pendidikan politik.

C. Batasan Masalah

Sehubungan dengan identifikasi masalah tersebut dan begitu luasnya permasalahan ini, serta keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka batasan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda oleh partai Golkar dan PAN di Kota Padang Panjang.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda oleh Partai Golkar dan PAN di Kota Padang Panjang ditinjau dari segi :

1. Bagaimana program – program pendidikan politik bagi generasi muda oleh Partai Golkar dan PAN di Kota Padang Panjang.
2. Materi apa saja yang disampaikan oleh Partai Golkar dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda di Kota Padang Panjang.
3. Metoda dan media apa saja yang digunakan oleh Partai Golkar dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda di Kota Padang Panjang.

E. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi, batasan, dan rumusan masalah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda oleh Partai Golkar dan PAN ditinjau dari segi :

1. Program pendidikan politik bagi generasi muda oleh Partai Golkar dan PAN di Kota Padang Panjang.
2. Materi pendidikan politik bagi generasi muda oleh Partai Golkar dan PAN di Kota Padang Panjang.
3. Metoda dan media pendidikan politik bagi generasi muda oleh Partai Golkar dan PAN di Kota Padang Panjang.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda oleh Partai Golkar dan PAN di Kota Padang Panjang ditinjau dari segi :

1. Menjelaskan Program pendidikan politik bagi generasi muda oleh Partai Golkar dan PAN di Kota Padang Panjang.
2. Menjelaskan materi yang digunakan oleh Partai Golkar dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan bagi generasi muda di Kota Padang Panjang.
3. Menjelaskan metoda dan media yang digunakan oleh Partai Golkar dan PAN dalam pelaksanaan pendidikan bagi generasi muda di Kota Padang Panjang.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu politik khususnya berkaitan dengan pendidikan politik.

- b. Menjadi bahan referensi dan memberikan informasi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi partai politik, pemerintah, dan LSM agar senantiasa memberikan pendidikan politik secara berkesinambungan bagi generasi muda.
- b. Memberikan wawasan dan pemahaman kepada generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik dan mampu menjadi warga negara yang paham akan hak, kewajiban, dan tanggungjawabnya.
- c. Sebagai masukan dan landasan berpijak bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pendidikan politik, serta sebagai pemenuhan tugas akhir perkuliahan (skripsi).